

## RINGKASAN

**DARAJAT ALI FIRDAUS**, Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat mengenai Notaris SS, SH dengan dakwaan “Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik “. Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, akan tetapi tanggung jawab yang dapat dimintakan dari seorang Notaris adalah sebagai pihak yang “Turut serta memalsukan akta”.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas masalah tersebut lebih lanjut pada rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Notaris bertanggungjawab secara pidana terhadap pemberian keterangan palsu oleh para pihak dalam pembuatan akta otentik dan Apa pertimbangan hukum yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dengan tingkat peninjauan kembali?

Tujuan penelitian ini, Untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris atas pemberian keterangan palsu oleh para pihak dalam pembuatan akta otentik dan Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dengan tingkat peninjauan kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis dengan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Sebagai pejabat pembuat akta maka seorang notaris tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya atas tuntutan turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya atau tuntutan atas pasal 266 KUHP karena Pasal 266 KUHP lebih spesifik ditujukan pada pihak yang "menyuruh" memasukkan keterangan palsu, sedangkan notaris dalam hal ini memiliki peran membuat akta. Kedua, Perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama , Banding dan Kasasi dengan Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali yaitu terletak pada kewajiban Notaris terhadap kebenaran materiil surat-surat pendukung yang diajukan oleh para pihak/penghadap.

## SUMMARY

**DARAJAT ALI FIRDAUS**, Notary is a Public Official who has authority from the State to carry out some of his state duties in the Civil Service sector. In carrying out their office, many Notaries commit violations, both civil and criminal, such as the case that the author raised regarding Notaries SS, SH with the charge of "Participating in ordering to include false information in an authentic deed". However, if we look at the authority of a Notary as an official who makes authentic deeds, the notary cannot be held responsible as a party who participated in ordering to insert false information into an authentic deed, but the responsibility that can be asked of a Notary is as a party who "participated in falsify the deed".

Based on the description and background of the problem above, the author will discuss the problem further in the problem formulation as follows: Is the Notary criminally responsible for providing false information by the parties in making an authentic deed and what are the legal considerations that result in differences in the Decision of the Panel of Judges? first level, appeal level, and cassation level with the level of judicial review?

The purpose of this research is to analyze the responsibility of Notaries for providing false information by parties in making authentic deeds and to analyze the legal considerations that result in differences in the decisions of the Panel of Judges at the first level, at the appeal level and at the cassation level and at the level of judicial review.

This research is normative legal research, with statutory, conceptual and case approaches. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of descriptions arranged systematically using qualitative data analysis methods.

The results of the research show that: As a deed-making official, a notary cannot be held responsible for claims of participating in inserting false information into the deed he made or claims for Article 266 of the Criminal Code because Article 266 of the Criminal Code is more specifically aimed at parties who "order" to enter false information. , while the notary in this case has the role of making the deed. Second, the difference between the legal considerations of the Panel of Judges at the First, Appeal and Cassation level and the Panel of Judges at the Judicial Review level lies in the Notary's obligation to ensure the material truth of the supporting letters submitted by the parties/applicants.